

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konflik

Secara etimologi, kata konflik berasal dari kata kerja latin “*configere*”, yang dapat diartikan sebagai pemukulan yang terjadi di antara dua pihak, sehingga konflik dapat dipahami sebagai suatu proses sosial yang terjalin antara dua individu atau lebih di mana salah satu pihak kemudian berusaha untuk menyingkirkan pihak yang lain dengan membuatnya tidak berdaya.¹

Selanjutnya, konflik juga dapat diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda.² Senada dengan itu, Dunae Ruth-Heffelbower yang dikutip oleh Sarlito dalam *Psikologi Sosial* menyatakan bahwa konflik adalah sebuah kondisi yang terjadi apabila beberapa pihak mempunyai tujuan atau kepentingan yang berbeda, sehingga salah satu pihak akan berusaha untuk menghalangi keberhasilan perwujudan tujuan pihak yang lain.³

¹Eko Sudarmanto, *Manajemen Konflik* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 15.

²Umar A. Mulyati, *Perilaku Organisasi* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 94.

³Sarlito W, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 171.

1. Jenis-jenis Konflik

Adapun beberapa jenis-jenis konflik,⁴ di antaranya :

a. Konflik Intrapersonal

Konflik intrapersonal merupakan sebuah konflik atau pertentangan seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik jenis ini kadang kala terjadi apabila orang tersebut mempunyai dua keinginan yang sebenarnya tidak bisa diwujudkan secara bersamaan dalam waktu yang sama pula.

b. Konflik interpersonal

Jenis konflik ini ditandai dengan adanya pertentangan antara dua orang atau dua individu, di mana pertentangan tersebut disebabkan oleh karena adanya perbedaan keinginan. Jenis konflik ini kadangkala terjadi di antara dua individu yang memiliki perbedaan dalam hal status, pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya.

c. Konflik antar individu atau konflik antar kelompok

Jenis konflik ini merupakan sebuah konflik yang sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara seseorang menyikapi setiap tekanan untuk mewujudkan konformitas yang diharuskan dalam kelompok kerja di mana orang tersebut berada. Konformitas ini sendiri adalah sebuah jenis pengaruh sosial apabila seseorang

⁴Mohamad Mospawi, "Manajemen Konflik Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 16, no. 2 (2014): 41-43.

mencoba melakukan adaptasi atau penyesuaian antara sikap dan tingkah lakunya dengan norma sosial yang ada. Adapun salah satu contoh dari jenis konflik ini ialah seseorang dapat dikenakan hukuman oleh rekan kerjanya apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok kerjanya.

- d. Konflik antara beberapa kelompok dalam lingkup organisasi yang sama

Konflik jenis ini sering terjadi dalam suatu lingkup organisasi. Konflik ini ditandai dengan pertentangan antara staf dengan staf lainnya, atau pertentangan antara pekerja dengan pekerja lainnya.

- e. Konflik antara organisasi

Konflik antara organisasi ini dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau bidang, misalnya dalam bidang teknologi dan ekonomi; hubungan antara negara Amerika Serikat dengan beberapa negara lainnya dipandang sebagai suatu konflik karena organisasi-organisasi ini saling bersaing dalam mengembangkan teknologi baru, produk-produk baru, serta bersaing dalam penawaran harga yang lebih rendah.

2. Faktor-faktor penyebab konflik

Pada dasarnya, terdapat dua faktor utama penyebab terjadinya sebuah konflik,⁵ antara lain sebagai berikut :

a. Faktor kemajemukan horizontal

Konflik terjadi oleh karena adanya kemajemukan secara horizontal. Kemajemukan secara horizontal dalam masyarakat ditandai dengan beragamnya struktur masyarakat tersebut, di antaranya perbedaan suku, perbedaan agama, serta perbedaan pekerjaan seperti pedagang, petani, buruh, wartawan, supir, pengusaha dan berbagai pekerjaan lainnya.

b. Faktor kemajemukan vertikal

Faktor kemajemukan vertikal ditandai dengan adanya pengelompokan struktur masyarakat berdasarkan tingkatan pendidikan, kekayaan, serta kekuasaan. Kemajemukan vertikal ini sangat berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya konflik sosial oleh karena adanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki kekuasaan yang besar serta pendidikan yang mapan, sementara sebagian besar masyarakat tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki pendidikan yang mapan, serta kurang memiliki kekayaan.

⁵Sudarmanto, *Manajemen Konflik*, 20.

3. Dampak-dampak konflik

Terdapat dua macam dampak dari konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat, antara lain :

a. Dampak positif konflik

Terdapat beberapa dampak positif dari terjadinya sebuah konflik,⁶ di antaranya :

- 1) Memperkuat rasa solidaritas antar sesama anggota komunitas atau kelompok.
- 2) Sebagai jalan untuk memperjelas beberapa aspek kehidupan yang belum jelas sebelumnya.
- 3) Sebagai jalan untuk meminimalisir atau mengurangi rasa ketergantungan, baik antar individu maupun antar kelompok.
- 4) Konflik sebagai jalan perwujudan kembali kaidah-kaidah atau norma-norma lama, serta untuk menciptakan aturan-aturan baru.
- 5) Dengan terjadinya sebuah konflik dalam suatu masyarakat, maka akan diperoleh sebuah pemahaman bahwa pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat tersebut.

⁶Ibid, 120.

b. Dampak negatif konflik

Terdapat beberapa dampak negatif dari terjadinya sebuah konflik,⁷

di antaranya :

- 1) Kesatuan dalam kelompok dapat retak karena adanya konflik antar sesama anggota.
- 2) Konflik dapat berakibat pada rusaknya harta benda, dan tidak jarang mengakibatkan adanya kematian atau korban jiwa.
- 3) Konflik dapat berdampak pada terjadinya dominasi atau penguasaan dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

4. Konflik dalam Alkitab

a. Konflik dalam Perjanjian Lama

Dengan hadirnya dosa dalam kehidupan manusia melalui pemberontakan manusia pertama, maka kehidupan manusia selanjutnya akan terus bergumul dengan konflik yang tidak berkesudahan. Dalam Perjanjian Lama terdapat beberapa konflik yang terjadi⁸, misalnya konflik antara Kain dan Habel (Kejadian 4 : 1-16). Di dalam kisah Kain dan Habel menurut perikop ini, ada beberapa hal menonjol. Hal-hal tersebut ialah adanya perbedaan korban persembahan di antara Kain dan Habel (ayat 3-4), hakekat

⁷Ibid, 121.

⁸Gerry CJ Takaria, "Pandangan Alkitab Tentang Konflik," *Koininia Jurnal* 6, no. 1 (2014): 2-

dosa yang selalu menggoda manusia untuk melakukan kejahatan di hadapan Allah (ayat 7), adanya seruan darah dari dalam tanah (ayat 11), serta adanya sebuah tanda perlindungan yang berikan kepada Kain (ayat 14).

Konflik yang terjadi di antara Kain dan Habel ialah konflik kecemburuan, di mana adanya rasa sakit hati dari Kain kepada Habel adiknya, sebab Allah lebih memilih persembahan Habel dari pada persembahan Kain. Akhirnya, Kain membunuh Habel adiknya. Konflik ini secara jelas memperlihatkan bagaimana dampak dari pemberontakan manusia terhadap Allah, di mana manusia dapat menjadi pembunuh bagi saudaranya sendiri. Karena itu puncak dari sikap manusia yang egois atau mementingkan diri sendiri ialah pembunuhan.⁹

Pembunuhan dalam perikop ini diselubungi dengan penolakan tanggung jawab, sehingga pada ayat 9 Kain mengatakan "Apakah aku penjaga adikku?". Meskipun Kain menolak tanggungjawabnya terhadap Habel adiknya, namun Allah dengan penuh kasih memberikan sebuah tanda pada Kain, yakni tanda perlindungan. Kain memang dihukum, di mana ia dibuang ke daerah pengembaraan (dalam bahasa Ibrani NOD di ayat 16 yang berarti pengembaraan), tetapi dalam pengembaraan tersebut Allah

⁹S. Wismoady Wahono, *Di Sini Ku Temukan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 88.

tetap menyatakan perlindungan-Nya supaya Kain jangan dibunuh oleh siapa pun (ayat 15). Jadi, dari kisah konflik yang terjadi antara Kain dan Habel ini, maka dapat dipahami bahwa hukuman memang akan dinyatakan kepada orang yang bersalah, namun bukan berarti bahwa orang yang bersalah tersebut tidak akan mendapat bagian lagi dalam perlindungan Allah.¹⁰

Konflik dalam Perjanjian Lama juga terjadi dalam relasi antara Yakub dan Esau (Kejadian 25:19-34). Konflik yang terjadi antara Yakub dan Esau ini ialah menyangkut konflik warisan, dalam hal ini perebutan hak kesulungan. Yakub adalah seorang yang sangat berambisi, ia juga pernah melakukan tipu daya untuk mendapatkan kekuasaan, di mana karena tipu dayanya ia berhasil mengelabui Esau untuk mendapatkan hak kesulungan.¹¹

Selanjutnya, konflik Yusuf dan saudara-saudaranya (Kejadian 37:1-36). Konflik yang terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya ialah menyangkut konflik dalam rumah tangga, yakni adanya ketidakadilan dalam keluarga, di mana Yusuf diperlakukan secara istimewa dalam keluarganya, sehingga saudara-saudara Yusuf yang lainnya cemburu terhadap Yusuf. Kemudian adapun

¹⁰Ibid.88

¹¹David F. Hinson, *Sejarah Israel Pada Zaman Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 40.

dampak dari kecemburuan tersebut ialah Yusuf dibuang ke sumur, dan setelah itu Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya.

b. Konflik dalam Perjanjian Baru

Selain dalam Perjanjian Lama, konflik juga kerap kali dalam Perjanjian Baru, ¹² misalnya konflik dalam lingkup Jemaat di Korintus berdasarkan 1 Korintus 1 : 10 – 17. Konflik ini terjadi karena adanya pengkotak-kotakan anggota Jemaat saat itu. Hal ini ditandai dengan adanya anggota Jemaat yang menyatakan diri dari golongan Apolos, dari golongan Paulus, dari golongan Kefas, serta dari golongan Kristus (ayat 12). Karena permasalahan inilah maka Paulus menasihatkan jemaat di Korintus untuk seia sekata serta sehati sepikir, sehingga perpecahan tidak terjadi dalam Jemaat.

Konflik dalam Perjanjian Baru juga terjadi dalam relasi Paulus dan Barnabas (Kisah Para Rasul 15:36-40). Konflik dalam perikop ini ialah konflik antara rekan pelayanan, dalam hal ini mengajak atau meninggalkan Markus, di mana ketika Paulus dan Barnabas hendak kembali ke setiap kota yang pernah mereka tempati memberitakan injil, Barnabas berencana untuk membawa Markus bersama dengan mereka. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Paulus dengan alasan bahwa Markus pernah meninggalkan

¹²Takaria, "Pandangan Alkitab Tentang Konflik, 3-4"

mereka dalam pelayanan di Pamfilia. Akhirnya terjadilah konflik atau perselisihan di antara mereka, sehingga kemudian mereka berpisah, di mana Paulus lebih memilih untuk berangkat ke Siria dan Kilikia bersama dengan Silas, dan Barnabas memilih berangkat ke Siprus dengan tetap membawa Markus.

Selanjutnya, konflik dalam Alkitab juga sangat berkaitan erat dengan enam bentuk perselisihan dasar,¹³ di antaranya :

a. Konflik eksternal

Konflik ini terkait dengan persaingan, regulasi atau langkah mengambil-alih kedudukan tertentu, seperti yang dilakukan oleh Daud atas upaya perlindungan untuk ladang Nabal;

b. Konflik manajemen

Konflik ini berakar dari gaya kepemimpinan, proses pembuatan keputusan yang kurang baik, seperti pergumulan Daud menghadapi kepemimpinan Raja Saul, dan agar ia sendiri tidak melakukan kesalahan yang sama;

c. Konflik tentang masalah strategis yang melibatkan unsur ketidakpastian dalam menentukan arah dan visi kelembagaan, sebagaimana terlihat ketika Daud terburu-buru mengucapkan sumpah di tengah-tengah pergumulannya;

¹³Michael S. Moore, *Rekonsiliasi Sebuah Telaah Tentang Perselisihan Keluarga Dalam Alkitab* (Surabaya: YAKIN, 2012), 47.

- d. Konflik dalam melaksanakan tugas yang melibatkan berbagai macam pertengkaran kecil setiap hari dalam sebuah komunitas, seperti pada waktu Daud kebingungan dalam mengusahakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari kelompok pasukan yang terus berkembang;
- e. Konflik antar departemen yang biasa terjadi ketika sejumlah departemen yang dibentuk dalam suatu lembaga ternyata mempunyai pandangan yang berbeda atas hal-hal yang tidak terlalu serius, seperti pimpinan kelompok dari para pegawai Nabal yang lebih memilih untuk berpihak pada orang-orangnya Daud.
- f. Konflik atas nilai-nilai tertentu, terutama ketika terjadi benturan antara ukuran moralitas dengan pandangan sehari-hari warga masyarakat, seperti kemampuan bicara Abigail yang sangat brilian, yang menyadarkan Daud untuk tidak bertindak ceroboh sehubungan dengan hal-hal yang sebenarnya dibencinya juga.

B. Tradisi

Secara epistemologi, kata tradisi berasal dari kata *tradition* dalam bahasa latin, yang dapat diartikan sebagai kebiasaan, adat istiadat, *culture* atau budaya. Hal ini senada dengan konsep yang diungkapkan oleh Van Reusen, bahwa tradisi merupakan sebuah warisan atau peninggalan, aturan-aturan, adat-istiadat yang dilaksanakan dari generasi ke generasi dengan

kata lain secara turun temurun.¹⁴ Selanjutnya, adapun alasan utama mengapa tradisi ini diwariskan oleh para nenek moyang kepada keturunan selanjutnya, ialah karena tradisi dianggap sebagai sebuah hal yang akan memberikan pedoman atau aturan hidup bagi keturunan selanjutnya.¹⁵

Dari beberapa penjelasan di atas, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa tradisi merupakan hal yang telah dilaksanakan sejak dahulu secara turun-temurun dan hal tersebut telah tumbuh sebagai bagian dari kehidupan masyarakat tertentu. Tradisi yang telah diwariskan tersebut hendaknya dapat dilestarikan untuk dipedomani dari generasi ke generasi.

C. Kearifan Lokal

Menurut kamus Inggris-Indonesia, kearifan lokal terdiri atas dua kata yakni kata *wisdom* atau kearifan yang berarti kebijaksanaan, dan kata *local* atau lokal yang berarti setempat. Selanjutnya, kearifan lokal juga merupakan nilai-nilai, gagasan-gagasan, pandangan-pandangan setempat yang penuh kearifan, mengandung kebaikan, serta bersifat bijaksana untuk dihidupi oleh setiap anggota masyarakat.¹⁶ Dari beberapa penjelasan di atas, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa kearifan lokal adalah sebuah gagasan yang telah dikembangkan oleh para leluhur dalam kehidupan keseharian mereka, di mana gagasan tersebut kemudian diperkenalkan serta

¹⁴Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam" (Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto, 2019), 96.

¹⁵Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 145.

¹⁶Darmawan Harefa, *Teori Ilmu Kealaman Dasar* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 153.

diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kemudian, selain sebagai *local wisdom* atau kebijakan setempat, kearifan lokal juga dapat disamakan dengan *local knowledge* atau pengetahuan setempat, serta *local genius* atau kecerdasan setempat. kearifan lokal dapat dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*).¹⁷

Menurut Karo, kearifan lokal adalah sesuatu yang sangat berdampak dalam kehidupan kelompok tertentu yang dianggap baik ketentuan agama, di mana pengaruh tersebut mengandung unsur kebaikan.¹⁸ Karena itu, hadirnya kearifan lokal ini sangat membawa pengaruh untuk menjiwai suatu kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan sebuah kecerdasan manusia yang diperoleh melalui kisah hidup atau pengalaman suatu masyarakat.¹⁹ Kemudian, kearifan lokal (*lokal wisdom*) juga dapat dipahami sebagai aturan tak tertulis yang dijadikan acuan atau pedoman untuk membangun interaksi sosial dalam suatu kelompok masyarakat.²⁰

¹⁷Tri Cicik Wijayanti, *Teori Dan Implementasi Kepemimpinan Strategis* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021), 184 .

¹⁸Nurchahya Hartiwisidi, "Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Mandar Metabe' Dan Mepuang Di SDN 001 Campalagian" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), 12.

¹⁹Rahyono FX, *Kearifan Lokal Dalam Kata* (Jakarta: Wedatama Widyastra, 2009), 11.

²⁰Tety Nur Cholifah, *Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal Malang Selatan* (Malang: Media Nusa Creative, 2019), 15.

1. Jenis-jenis kearifan lokal

Terdapat beberapa jenis kearifan lokal, di antaranya:²¹

- a. Nilai adat, yakni nilai yang dijadikan pedoman oleh masyarakat untuk mengatur cara bersikap (etika)
- b. Prosedur atau tata cara bercocok tanam yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, di mana hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian alam dalam lingkup pertanian.
- c. Tata cara pemilihan ruang dan tempat.

2. Fungsi Kearifan Lokal

Terdapat beberapa fungsi dari kearifan lokal, di antaranya : ²²

- a. Melalui kearifan lokal atau kebijakan setempat, maka pelestarian SDA dapat tercapai.
- b. Selain sebagai jalan untuk melestarikan SDA, kearifan lokal juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengembangan SDM.
- c. Kearifan lokal atau kebijakan setempat mempunyai fungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- d. Kearifan lokal yang ada dalam suatu masyarakat dapat berfungsi sebagai pantangan, sastra, serta berfungsi sebagai kepercayaan.

²¹Harefa, *Teori Ilmu Kealaman Dasar*, 154.

²²Ibid, 155.

3. Perwujudan *Karapasan* melalui Kearifan Lokal Toraja

Setiap kearifan lokal yang ada dalam suatu masyarakat, tentu memuat kebijakan-kebijakan lokal yang diharapkan dapat dijadikan suatu pedoman untuk berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat lainnya, dalam hal ini anggota masyarakat dapat tetap hidup dalam relasi damai satu sama lain. Secara khusus dalam masyarakat Toraja, relasi damai atau kedamaian sering disebut dengan istilah *karapasan*, di mana dalam kamus Toraja – Indonesia, *karapasan* berarti perdamaian. Sifatnya menyampaikan perdamaian kepada orang lain, maupun mendamaikan dari masalah yang diadukan kepadanya.²³ Maka dapat dipahami bahwa *karapasan* adalah sebuah filosofi yang dijunjung tinggi oleh orang Toraja, yang berupa persatuan, ketenteraman, kedamaian, atau yang dalam kekristenan sering kita sebut shalom.

Terdapat 4 (empat) nilai karakter dalam filosofi *karapasan*, yaitu :²⁴

- a. Persatuan, yaitu nilai karakter dari *karapasan* yang pada hakekatnya mengikat setiap masyarakat Toraja guna menjaga persatuan. Hal ini ditandai dengan sebuah semboyan orang Toraja yang menyatakan “*misa’ kada dipotuo, pantan kada di pomate*” yang artinya “kita akan teguh ketika kita bersatu, dan sebaliknya kita mati (runtuh atau tercerai-berai) ketika kita tidak bersatu.

²³H van deer Veen dan J. Tammu, *Kamus Toradja-Indonesia* (Jajasan Perguruan Kristen Toradja, 1972).

²⁴Yanni Paembonan Dkk, *Teologi Kontekstual & Kearifan Lokal Toraja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 143-144.

- b. Kedamaian, yaitu nilai karakter dari *karapasan* sekaitan dengan kata-kata bijak sebagai perwujudan menciptakan suasana tenang dalam segala keadaan. Hal ini ditandai dengan sebuah ungkapan orang Toraja yang menyatakan "*masakke mairi' marudindin sola nasang*" yang berarti "membawa kesejukan bagi semua orang".
- c. Ketenteraman, yaitu nilai karakter dari *karapasan* yang berupa ketertiban dalam berperilaku, di mana nilai ini sebenarnya dimiliki oleh setiap orang yang patuh akan peraturan. Hal ini ditandai dengan sebuah ungkapan orang Toraja yang menyatakan "*massali papan mairi' sola nasang*" yang berarti "kesamarataan kehidupan".
- d. Ketenangan yaitu nilai karakter dari *karapasan* yang berupa tertata rapinya kehidupan yang berhubungan dengan jiwa, dengan kata lain keadaan yang tidak kacau. Hal ini ditandai dengan sebuah ungkapan orang Toraja yang menyatakan "*rapa' tallan kopena da'mu magiang-giang*" yang berarti "janganlah bimbang, tenanglah hai jiwaku".

Penjelasan ini hendak menegaskan bahwa masyarakat Toraja sangat berupaya untuk mewujudkan keharmonisan dalam lingkup kehidupan, seperti; mengubah perselisihan menjadi perdamaian, serta menata tatanan hidup (interaksi) masyarakat Toraja.

D. Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik erat kaitannya dengan rekonsiliasi, di mana menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, rekonsiliasi merupakan suatu perbuatan memperbaharui seperti semula,²⁵ juga menurut Kamus Inggris Indonesia, rekonsiliasi adalah perukunan kembali atau perdamaian.²⁶

Selanjutnya, rekonsiliasi juga merupakan suatu bentuk pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah, yang tidak akan bermakna apa pun apabila tidak diwujudkan dalam hubungan damai dengan sesama manusia.²⁷ Jadi dapat dipahami bahwa rekonsiliasi adalah suatu upaya pemulihan hubungan yang telah renggang dengan kata lain relasi yang tidak harmonis lagi, baik itu hubungan antar manusia (relasi secara horizontal), maupun hubungan manusia dengan Tuhan (relasi secara vertikal).

1. Bentuk-bentuk Penyelesaian Konflik

Beberapa bentuk Penyelesaian Konflik, di antaranya :²⁸

a. Negosiasi

Pada dasarnya negosiasi adalah sebuah sebuah musyawarah atau perundingan. Negosiasi merupakan sebuah bentuk penyelesaian konflik yang tidak menggunakan bantuan pihak ketiga, di mana

²⁵Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2005), 410.

²⁶John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1987), 470.

²⁷Basilica Dyah Putranti, *Perempuan, Konflik, Rekonsiliasi Perspektif Teologi Dan Praksis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016). 7

²⁸M. Rawa El Amady, *Manajemen Konflik Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), 16-17.

negosiasi ini bertujuan untuk mencari alternatif penyelesaian masalah yang dianggap adil oleh para pihak yang berkonflik. Sementara menurut Cristian F. Guswai, terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam negosiasi,²⁹ di antaranya :

- 1) Negosiasi sebagai jalan perwujudan kesepakatan
- 2) Negosiasi memiliki batas waktu
- 3) Negosiasi adalah sebuah proses
- 4) Negosiasi menawarkan solusi yang saling menguntungkan atau *win-win solution*
- 5) Negosiasi menggunakan langkah sistematis yang disebut 3P yakni Persiapan, Penyidikan, dan Pengajuan

b. Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi merupakan sebuah upaya penyelesaian suatu konflik dengan menggunakan bantuan pihak ketiga atau yang biasa disebut pihak penasihat.³⁰ Senada dengan itu, Takdir Rahmadi menyatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau mufakat dengan bantuan pihak

²⁹Indah Lestari, *Teks Negosiasi Dan Teks Anekdote* (Medan: Universitas Muslim Nusantara, 2022), 26.

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 726.

netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.³¹ Jadi dapat dipahami bahwa mediasi adalah sebuah proses perundingan penyelesaian konflik antara dua pihak atau lebih dengan bantuan pihak penengah yang bersifat netral, di mana mediator tersebut hanya berfungsi untuk membantu merumuskan persoalan, oleh karena mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sebuah perkara dalam mediasi.

c. Konsiliasi

Sebagaimana halnya mediasi, konsiliasi juga menggunakan bantuan pihak ketiga dalam penyelesaian sebuah sengketa atau konflik. Pihak ketiga dalam konsiliasi bertugas untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian konflik yang akan ditawarkan kepada para pihak yang berkonflik. Di samping itu, konsiliator hanya berwenang untuk membuat rekomendasi, tetapi tidak berwenang untuk membuat keputusan. Sehingga ketika tidak tercapai kata sepakat dalam konsiliasi, maka konsiliator akan menawarkan masukan, di mana masukan tersebut tidak bersifat mengharuskan karena pihak yang berkonfliklah yang akan

³¹Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 12.

memutuskan apakah mau menerima masukan konsiliator tersebut atau tidak.³²

d. Fasilitasi

Fasilitasi adalah suatu proses penyelesaian konflik di mana fasilitator berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak yang berbeda pandangan, sehingga tercipta sebuah dialog yang akan menjembatani perbedaan mereka. Kemudian, dengan terciptanya dialog yang baik maka para pihak akan dapat mempercayai proses yang ditawarkan oleh fasilitator. Adapun tujuan utama dari fasilitasi ini ialah untuk mewujudkan kesepahaman bersama di antara para pihak yang berkonflik, sehingga mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan dalam mengakhiri konflik.³³

2. Penyelesaian Konflik (Rekonsiliasi) dalam perspektif Geiko Muller

Menurut Geiko Muller, rekonsiliasi sangat berhubungan erat dengan proses untuk mendamaikan situasi yang kacau atau situasi yang tidak adil,³⁴ sehingga rekonsiliasi yang dilaksanakan hendaknya berujung pada sebuah pengampunan; dalam hal ini yang seorang

³²A. Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YHLBHI, 2007), 201.

³³Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 12.

³⁴Geiko Muller, *Rekonsiliasi Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan Dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Ledalero, 2005), 4.

menyesal dan yang lain memaafkan. Dengan demikian, pertobatan dan pengampunan dapat dipandang sebagai dua sisi dari satu proses, di mana pelaku satu tindakan kejahatan mengakui pelanggaran dan korban dari tindakan tersebut memberi ampun.³⁵

Dalam bukunya tentang "Rekonsiliasi – Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan Dalam Masyarakat", Geiko Muller juga mengaitkan konsep pengampunan dengan pandangan Alkitab, di mana dalam Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru), istilah "pengampunan" (Yunani, *aphesis*) digunakan secara luas. Pengertian dari istilah pengampunan ini ialah pembebasan dari belenggu, penghapusan utang, kesalahan atau hukuman. Perlu diingat bahwa pada zaman dahulu utang-utang secara finansial dapat menggiring seseorang pada pemenjaraan atau perbudakan, dan bahwa penebusan dari pertanggung jawaban seperti itu berarti pembebasan dari penjara atau perbudakan bagi orang yang berutang itu dan anak-istrinya.

Singkatnya bahwa Alkitab memandang pengampunan sebagai suatu proses yang tidak terpisahkan antara pelaku tindak kejahatan dengan korban. Pengampunan dapat terjadi apabila si pelaku tindak kejahatan itu mengutarakan permohonan maaf dan si korban dari tindakan kejahatan tersebut memaafkannya. Sifat timbal balik ini sangat mendasar bagi pemahaman gagasan alkitabiah. Melalui perjumpaan ini

³⁵Ibid. 6

kedua belah pihak kemudian diubahkan, dalam hal ini terjadi penyembuhan yang membuka jalan bagi terwujudnya kerja sama yang lebih baik di antara pihak-pihak yang saling berkonflik sebelumnya.

Dengan demikian, pengampunan pada hakekatnya bukan hanya sekedar kata melainkan lebih kepada proses perjumpaan, penyembuhan, serta peyingkapan pilihan-pilihan yang baru untuk masa mendatang. Sebuah masa lalu yang penuh dengan konflik, kini diubahkan menjadi sebuah masa yang indah karena dibangun di atas kerjasama serta saling mempercayai satu sama lain.³⁶

3. Rekonsiliasi konsiliator dalam perspektif Heffelbower

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsiliasi merupakan sebuah upaya untuk mencapai persetujuan di antara pihak yang berselisih. Sebagai jalan perwujudan tujuan dari konsiliasi ini, maka diangkatlah pihak penengah bagi individu atau kelompok yang sedang berselisih paham, yang disebut konsiliator, di mana konsiliator inilah yang kemudian menjadi pihak pendamai dalam pelaksanaan rekonsiliasi.

Konsiliator adalah seorang pihak penengah yang bijaksana, paling tidak ia memiliki status yang sama dengan pihak yang berkonflik, serta dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Dalam penyelesaian sebuah

³⁶Ibid, 9.

konflik, konsiliator akan mendengarkan secara seksama kedua pihak yang berkonflik, kemudian ia akan mengusulkan sebuah jalan keluar atau solusi. Semakin bijak seorang konsiliator memberikan nasehat dengan mempertimbangkan banyak hal maka semakin besar kemungkinan pihak yang berselisih akan mengikuti nasehat konsiliator tersebut. Dengan demikian, konsiliator mempunyai peran yang sangat besar dalam penyelesaian konflik, oleh karena konsiliator menjadi pengontrol situasi dalam proses rekonsiliasi.³⁷

Adapun beberapa kriteria seorang konsiliator,³⁸ antara lain :

- a. Ketidakberpihakan. Konsiliator adalah seorang yang netral dengan kata lain tidak berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik.
- b. Akses. Konsiliator adalah orang-orang yang memiliki akses atau kedekatan dengan pemimpin lebih dari kedua pihak yang berkonflik.
- c. Kecocokan. Konsiliator atau kelompok yang melakukan intervensi adalah orang-orang yang tidak bertentangan dengan kata lain orang-orang yang cocok satu sama lain.
- d. Kecakapan. Konsiliator yang melakukan intervensi hendaknya memenuhi beberapa hal, di antaranya :

³⁷Duane Ruth dan Heffelbower, *Pemberdayaan Untuk Rekonsiliasi* (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2000), 8-10.

³⁸Laili Shofiya Kurniawari, "Rekonsiliasi Konflik Dalam Keluarga Studi Komparasi Lembaga Konsultan Ruang Sahabat Keluarga Dan Rifka Annisa Women Crisis Centre Di Yogyakarta" (UIN Sunan Kalijaga, 2016), 22-23.

- 1) Mempunyai keahlian untuk memudahkan terjadinya sebuah pertemuan.
 - 2) Memiliki pemahaman yang baik sekaitan dengan permasalahan politik.
- e. Mempunyai nama baik dalam suatu komunitas di mana ia berada, serta memiliki lembaga yang dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.
- f. Komitmen dan waktu. Konsiliator sebagai pihak penginterpensi hendaknya memiliki komitmen dan kesiapan waktu untuk menempuh proses yang cukup panjang dalam menyelesaikan sebuah konflik.